

**PENGARUH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MELALUI VARIABEL INTERVENING PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA**

(Survey pada Masyarakat Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan
Bubulan Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Oleh
LIFIANI IRA HIDAYATULLAH
NIM: G91218080



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN

Saya Lifiani Ira Hidayatullah, G91218080, menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan semata-mata hasil penelitian saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain atas nama saya atau bukan juga hasil dari menyalin atau menjiplak karya orang lain. Di UIN Sunan Ampel Surabaya atau universitas manapun, skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.
2. Tidak ada tulisan atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dicantumkan dalam skripsi ini, kecuali yang telah disebutkan dalam daftar pustaka dan dicantumkan dengan jelas sebagai sumber rujukan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan benar, dan apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan atau ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik seperti pencabutan gelar yang saya terima untuk penulisan skripsi ini, beserta sanksi lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 21 Oktober 2022



Lifiani Ira Hidayatullah

NIM. G91218080

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 21 Oktober 2022

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fatmah', written in a cursive style with a horizontal line crossing through the middle of the letters.

Dr. Hj. Fatmah, ST., MM.

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI VARIABEL INTERVENING PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

(Survey pada Masyarakat Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan
Bubulan Kabupaten Bojonegoro)

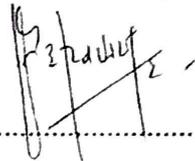
Oleh
Lifiani Ira Hidayatullah
NIM: G91218080

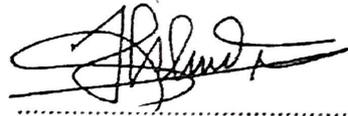
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 28 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

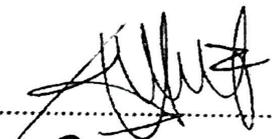
Susunan Dewan Penguji:

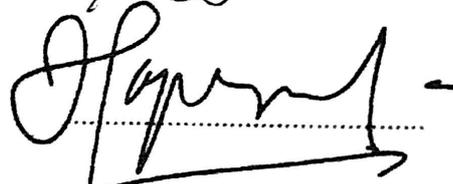
1. Dr. Hj. Fatmah, ST., MM.
NIP. 197507032007012020
(Penguji 1)
2. Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
NIP. 197008042005011003
(Penguji 2)
3. Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001
(Penguji 3)
4. Hapsari Wiji Utami, M.SE
NIP. 198603082019032012
(Penguji 4)

Tanda Tangan:









Surabaya, 28 Oktober 2022

Dekan




Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lifiani Ira Hidayatullah
NIM : G91218080
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail address : lifianiira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA MELALUI VARIABEL INTERVENING PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DESA (SURVEY PADA MASYARAKAT DUSUN KRAJAN DESA

CANCUNG KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2022

Penulis

(Lifiani Ira Hidayatullah)

ABSTRAK

Pelaksanaan program dan kegiatan desa di bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa diprioritaskan untuk dibiayai dengan alokasi dana desa. Jika keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran, dengan partisipasi pemangku kepentingan yang beragam, maka pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan secara efektif.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui variabel intervening pembangunan infrastruktur desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif asosiatif dengan teknik pengambilan sampel *probability sampling* dengan *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 92 responden yang merupakan masyarakat di Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis jalur (*path analysis*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh secara langsung penggunaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa, penggunaan alokasi dana desa dan pembangunan infrastruktur desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa, dan pengaruh secara tidak langsung penggunaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa sebagai variabel intervening.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini kepada pemerintah Desa Cancung yaitu agar lebih dapat mengalokasikan dana desa pada program pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara merata dan menyeluruh agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Cancung.

Kata Kunci: Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 LANDASAN TEORI	10
2.1 Alokasi Dana Desa	10
2.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa	17
2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa	19
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian	26
2.6 Kerangka Konseptual	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.4 Variabel Penelitian	33

3.5	Definisi Operasional.....	34
3.6	Uji Validitas dan Reliabilitas	35
3.7	Data dan Sumber Data	36
3.8	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.9	Teknik Analisis Data.....	38
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Deskripsi Umum Objek Penelitian	41
4.2	Karakteristik Responden	42
4.3	Analisis Data	45
4.4	Pembahasan.....	56
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN.....	77
	BIODATA PENULIS.....	93

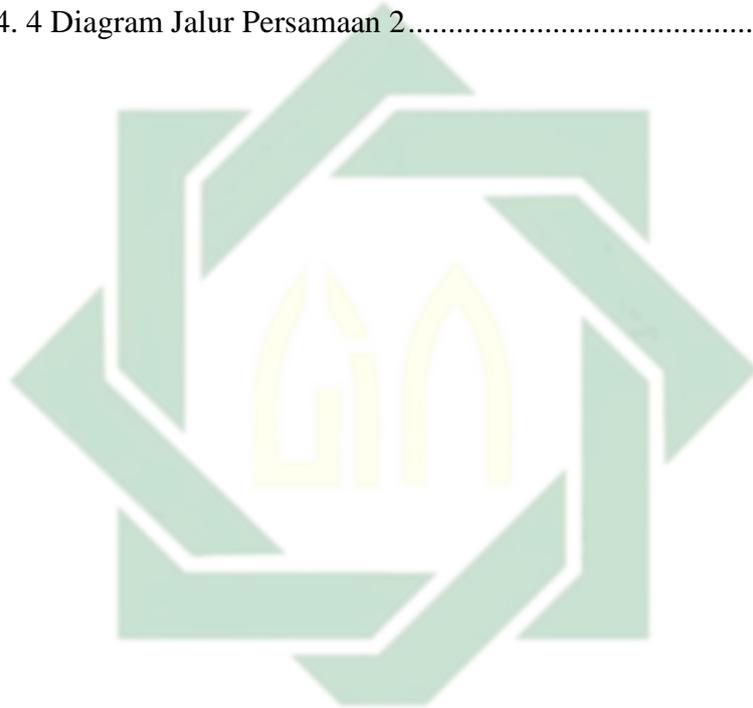
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Indeks Desa Membangun	6
Tabel 1. 2 Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cancung Tahun 2018-2021.....	7
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	34
Tabel 3. 2 Pengukuran Skala Likert.....	37
Tabel 4. 1 Jumlah Dusun, RW dan RT Desa Cancung	42
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Cancung.....	42
Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden	42
Tabel 4. 4 Usia Responden.....	43
Tabel 4. 5 Pekerjaan Responden	43
Tabel 4. 6 Pendidikan Terakhir Responden	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	47
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	50
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Persamaan 1	52
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Persamaan 2	52
Tabel 4. 14 Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Probability Plot.....	48
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot	51
Gambar 4. 3 Diagram Jalur Persamaan 1	52
Gambar 4. 4 Diagram Jalur Persamaan 2.....	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	77
Lampiran 2 Tabulasi Data Responden	80
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas X	87
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Y	87
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas Z.....	88
Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas X	89
Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas Y	89
Lampiran 8 Hasil Uji Reliabilitas Z.....	89
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas	89
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolinearitas	90
Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	91
Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	91
Lampiran 13 Hasil Uji Parsial (t).....	92

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara hukum adanya desa dinyatakan pada UU Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 yang mengatakan bahwasanya desa mempunyai hak tradisional dan hak sejarah dalam mengelola dan melaksanakan kepengurusan masyarakat serta memiliki peran untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang didasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 (Herianto, 2018).

Keberadaan desa mempunyai peran yang amat penting sebagai penunjang pertumbuhan pemerintahan nasional, dikarenakan kemajuan di wilayah pedesaan akan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan program pemerintah (Suardi, 2021). Penduduk Indonesia sebagian besar masih tinggal di wilayah pedesaan, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur desa menjadi prioritas utama keberhasilan program-program yang direncanakan pemerintah dalam upaya pengembangan dan kemajuan wilayah pedesaan terutama wilayah yang tertinggal.

Untuk melaksanakan peran dan kegunaan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan desa pada seluruh aspek dan berdasarkan kewenangan yang diberikan, dalam UU Tahun 2014 Nomor 6 disebutkan bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur alokasi dana desa. Sebagai sumber penghasilan desa, dana desa dianggarkan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tiap tahunnya dan disalurkan

untuk tiap desa yang kemudian dianggarkan dan dialokasikan untuk kepentingan desa (Muslihah et al., 2019). Adanya alokasi dana desa dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan desa melalui pembiayaan seluruh program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam rangka mempercepat pembangunan dan pertumbuhan desa terutama di desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Tanpa adanya alokasi dana desa otomatis pelaksanaan pemerintahan juga tidak dapat terlaksana mengingat seluruh program dan kegiatan yang dilakukan membutuhkan biaya yang bisa dikatakan tidak sedikit.

Penggunaan alokasi dana desa juga harus memperoleh manfaat yang besar dengan mengutamakan inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang harus segera dilakukan, lebih kritis, dan terkait langsung dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat desa. Manfaat kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus dijamin untuk meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan yang sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu di desa, dapat meningkatkan pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan keluarga (Fathony et al., 2019).

Peraturan Menteri Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Tahun 2015 Nomor 21 telah diatur prinsip alokasi dana desa yaitu mengenai ditetapkannya Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

yang mengatakan bahwasanya penggunaan dana desa memprioritaskan untuk dialokasikan pada pembiayaan kegiatan dan program desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (Firmansyah et al., 2020). Pada kegiatan dan program desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, dana desa diprioritaskan untuk digunakan pada pembiayaan kegiatan yang memiliki tujuan dalam peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan dalam pembangunan desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menurut Totok dkk merupakan suatu upaya dalam memandirikan dan memampukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kondisi kurang atau tidak mampu agar terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan (Suardi, 2021). Masyarakat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah di setiap desa. Akan tetapi, Sumber Daya Manusia masyarakat desa yang masih kurang menjadi suatu hambatan dan tantangan yang harus diatasi oleh setiap desa. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa sangat penting untuk dilakukan dengan harapan mampu menjadikan masyarakat lebih berdaya guna sehingga masyarakat mandiri dan mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan pemerintah desa merupakan cara yang lebih cepat dan paling efektif dikarenakan pemerintah desa yang memang memiliki

wewenang dalam alokasi dana desa untuk program pembangunan sebagai prioritas kebutuhan masyarakat sehingga masing-masing daerah yang memiliki potensi mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal (Herianto, 2018).

Pembangunan desa merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. UU Tahun 2014 Nomor 6 menjelaskan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat serta mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur desa, dan pemanfaatan secara berkelanjutan SDA (Sumber Daya Alam) (Septiansyah & Setiawan, 2021). Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas, diperlukan infrastruktur dengan kondisi memadai sebagai pendukung terlaksananya program dan kegiatan yang dilakukan agar berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah di wilayah pedesaan.

Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar program dan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan fungsi perangkat desa dalam menjalankan program. Pembangunan infrastruktur desa

sebagai program yang mendukung terselenggaranya pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat desa yang sebaik-baiknya dalam semua tahapan proses kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, membuat rencana program, memilih kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa yang dilakukan perlu mengarah pada tercapainya “desa mandiri”, yaitu desa dengan masyarakat yang memiliki motivasi membangun yang tinggi, memiliki kemampuan mengidentifikasi permasalahan, menyusun rencana dan melaksanakan rencana tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan dana dan sumber daya yang bersumber dari masyarakat desa serta dapat menjaga keberlangsungan proses pembangunan desa (Zulfadzal, 2020).

Tingkat keberhasilan pembangunan desa dapat diukur dengan menggunakan suatu indikator yang dinamakan Indeks Desa Membangun (IDM). Pentingnya IDM tersebut yaitu untuk kepentingan analisis ekonomi, mengawasi kegiatan perekonomian, dasar perbandingan antar wilayah dan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan. (Balilatfo - KDPDTT, 2019) Dalam Peraturan Pemerintah Desa PDT Trans Tahun 2016 Nomor 2 mengenai Indeks Desa Membangun, tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun secara spesifik yaitu agar dapat dipakai sebagai *base line* (garis dasar) pembangunan desa yang menjadi pokok dalam mengukur kemandirian

dan kemajuan desa (Balilatfo - KDPDTT, 2018). Desa diklasifikasikan dalam 5 klasifikasi pada Indeks Desa Membangun, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Klasifikasi Indeks Desa Membangun

No.	Status Desa	Rentang Nilai
1.	Mandiri	$IDM > 0,8155$
2.	Maju	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
3.	Berkembang	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4.	Tertinggal	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
5.	Sangat Tertinggal	$IDM \leq 0,4907$

Sumber: Indeks Desa Membangun

Desa Cancung merupakan suatu desa yang lokasinya ada di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro dengan penduduk sejumlah 3.532 jiwa. Desa Cancung termasuk dalam pedesaan atau wilayah terpencil dikarenakan letaknya dikelilingi oleh hutan-hutan jati yang cukup luas. Desa Cancung mulai membenah diri dari tahun ke tahunnya, diantaranya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Pemberdayaan masyarakat di Desa Cancung sudah lumayan baik dimana tingkat rata-rata pertumbuhan perekonomian yang dimiliki bisa dikatakan tidak sedikit, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang mampu dikarenakan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Desa Cancung juga lumayan baik meskipun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana dengan kondisi yang kurang memadai dan kurang mendapat perhatian pemerintah desa. Kondisi tersebut dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cancung pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cancung Tahun 2018-2021

Tahun	IDM	Status Desa
2018	0,6251	Desa Berkembang
2019	0,8095	Desa Maju
2020	0,8476	Desa Mandiri
2021	0,8457	Desa Mandiri

Sumber: Indeks Desa Membangun

Jika diamati melalui tabel 1.2 di atas, dari tahun ke tahun Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cancung selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwasanya upaya pembangunan desa yang diprogramkan oleh pemerintah dan dengan partisipasi masyarakat desa dapat dikatakan mampu meningkatkan IDM sehingga menjadikan Desa Cancung menjadi lebih baik.

Namun kondisi tersebut tidak menutup kenyataan bahwasanya pemberdayaan masyarakat desa Cancung hanya terfokus pada masyarakat di wilayah-wilayah tertentu di sekitar kantor kepala desa sehingga dikatakan masih belum merata. Selain itu, masih ditemui infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan pos PAUD dengan kondisi yang kurang memadai terutama di wilayah terpencil. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara lebih merata dan semaksimal mungkin agar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Variabel Intervening Pembangunan Infrastruktur

Desa (Survey pada Masyarakat Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang diambil peneliti antara lain:

- 1.2.1 Apakah terdapat pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa?
- 1.2.2 Apakah terdapat pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa dan pembangunan infrastruktur desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa?
- 1.2.3 Apakah terdapat pengaruh pembangunan infrastruktur desa sebagai variabel intervening pada penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yaitu untuk menjawab rumusan masalah, oleh sebab itu tujuan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa dan pembangunan infrastruktur desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur desa sebagai variabel intervening pada penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap

pemberdayaan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil merupakan suatu manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian. Manfaat yang didapatkan tidak hanya untuk peneliti saja melainkan juga dapat menghasilkan manfaat untuk orang lain. Peneliti berharap penelitian ini dapat menghasilkan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah dan memperbanyak kelengkapan bahan kajian tentang Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur desa serta dapat dipakai sebagai sumber bacaan atau sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

(1) Mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan ekonomi peneliti, khususnya tentang pengalokasian dana desa untuk kepentingan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur desa.

(2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan supaya pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa dengan tepat dikarenakan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur desa sebagai faktor pertumbuhan ekonomi desa.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Alokasi Dana Desa

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Dana desa yaitu dana yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota dan kabupaten yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan ditujukan bagi desa kemudian dialokasikan untuk mendanai terselenggaranya pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Pasal 1 Tahun 2014 Nomor 241) (Aminah & Sari, n.d.).

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 11 Tahun 2005 Nomor 72 dijelaskan bahwa dana desa yaitu dana yang sumbernya dari sebagian dana perimbangan yang diperoleh Kota atau Kabupaten dan diberikan oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten untuk desa dan dialokasikan untuk keperluan kepentingan desa. Dana desa yang sumbernya dari APBN adalah bentuk diakuinya desa oleh negara (Zulfadzal, 2020).

Alokasi dana desa yakni penyaluran separuh dana perimbangan keuangan yang dihasilkan kabupaten dan separuh dari pendapatan desa

yang dihasilkan dari pembagian hasil pajak daerah untuk desa dengan minimal sepuluh persen (Karimah et al., 2014). Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil semua kegiatan yang bersumber dari anggaran pengalokasian dana desa dilakukan secara terang-terangan dan dengan keikutsertaan masyarakat desa.

Alokasi dana desa pada dasarnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi desa agar desa tumbuh dan berkembang menurut pertumbuhannya sendiri yang didasarkan pada keragaman, demokratisasi, otonomi nyata, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa (Sulton Malik, 2019). Hal tersebut dikarenakan desa memiliki hak atas sebagian dana perimbangan daerah dan pusat dan sebagian pendapatan dari pajak kabupaten atau kota dan pajak daerah yang diperoleh.

Alokasi dana desa memiliki tujuan pemeratakan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan kualitas layanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, penguatan masyarakat desa yang menjadi subjek dalam pembangunan dan menjembatani pembangunan yang terjadi kesenjangan antar desa dalam DJPPMD Tahun 2015 (Zulfadzal, 2020).

2.1.2 Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

Dana desa disalurkan lewat APBD kota atau kabupaten yang ditujukan bagi desa yang kemudian diberikan secara merata dan adil kepada setiap desa. Besaran anggaran alokasi dana desa yang

diperuntukkan bagi desa di luar dan dari dana *on top* (Transfer Daerah) ditetapkan sebesar 10% secara bertahap. Anggaran dana desa diberikan menurut banyaknya desa dan dengan pertimbangan luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, tingkat kesulitan geografis desa dan angka kemiskinan desa dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di desa. Dalam perhitungan dana desa menggunakan bobot formula dan proporsi sebagai berikut:

(1) Porsi menurut formula sebesar 10% (Alokasi Formula):

- (a) Luas wilayah desa sebesar 10%.
- (b) Jumlah penduduk desa sebesar 25%.
- (c) Tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30%.
- (d) Angka kemiskinan desa sebesar 35%.

(2) Porsi yang dibagi rata sebesar 90% (Alokasi Dasar).

Perhitungan berdasarkan proporsi dan bobot formula tersebut digunakan dengan pertimbangan standar deviasi yang paling rendah, perbandingan yang menerima dana desa terbesar dan terkecil paling rendah yaitu 4:1, dan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan. Konsekuensi dari alokasi dana desa dengan penggunaan rumus perbandingan Alokasi Formula (AF) : Alokasi Dasar (AD) = 10% : 90% yaitu belum seutuhnya fokus pada upaya pemberantasan kemiskinan, belum menggambarkan pemihakan pada desa sangat tertinggal dan tertinggal serta belum seutuhnya mencerminkan keadilan dan pemerataan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dana desa disalurkan oleh BUN (Bendahara Umum Negara) yaitu Menteri Keuangan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Selanjutnya dana desa disalurkan ke RKD (Rekening Kas Desa) oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) yang melakukan penyaluran dari APBD. Dana desa disalurkan dari Pemerintah Pusat dengan bertahap ke Kota atau Kabupaten dan berakhir ke Desa (APBDes) dengan ketentuan:

- (1) Tahap I senilai 60% dari anggaran dana desa, paling lama Juli dan paling cepat Maret.
- (2) Tahap II senilai 40% dari anggaran dana desa, paling cepat Agustus.

Setelah APBD Kabupaten atau Kota menerima dana desa tiap tahap dilakukan penyaluran maksimal tujuh hari kerja, kemudian dana tersebut harus diberikan ke desa yang digunakan untuk keperluan desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

2.1.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Ditetapkannya prioritas penggunaan dana desa oleh Pemerintah dan Kementerian Desa PDTT sebagai pedoman dan hukum yang berlaku sah dalam pengalokasian dan pengaturan dana desa di daerah desa maju, berkembang, tertinggal, bahkan sangat tertinggal yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan serta kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Penggunaan dana desa diprioritaskan antara lain untuk (Ro'is Alfauzi, 2020):

(1) Prioritas yang didasarkan pada segi kemanfaatan. Dana desa yang digunakan pada dasarnya harus membawa manfaat besar bagi masyarakat desa dengan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang bersifat sangat penting untuk dilakukan. Indikator penggunaan dana desa yang membawa manfaat bagi masyarakat desa antara lain:

- (a) Kegiatan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
- (b) Mengembangkan kapabilitas dan kapasitas masyarakat dewasa, remaja bahkan anak-anak.
- (c) Mengembangkan usaha perekonomian menjadi lebih produktif.
- (d) Menanggulangi terjadinya bencana alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Prioritas yang didasarkan pada segi partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang akan digunakan berdasarkan mekanisme pembangunan partisipatif yang mengedepankan keikutsertaan masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan desa yang meliputi:

- (a) Mengutamakan kegiatan yang sebagian besar didukung oleh masyarakat desa.

- (b) Masyarakat desa yang sepenuhnya merencanakan dan mengelola suatu kegiatan.
- (c) Mengutamakan kegiatan yang pelaksanaannya memudahkan masyarakat desa untuk mengawasinya.
- (3) Prioritas yang didasarkan pada segi pendayaan dan swakelola sumberdaya. Penggunaan dana desa untuk mendanai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dan diarahkan agar dana desa selalu berputar untuk kepentingan desa. Perputaran dana tersebut diharapkan membuat kebutuhan pembangunan dan pengembangan desa dengan segala tanggung jawab dapat dipenuhi oleh pemerintah desa sebagai pemilik jabatan pemerintahan desa.
- (4) Prioritas yang didasarkan pada segi berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang didanai oleh dana desa akan sangat memudahkan tercapainya tujuan dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus membagi dana desa untuk menangani bencana non alam yang kemungkinan terjadi dan sebagai pengelolaan jangka panjang. Dalam prioritas ini dipastikan dana desa dialokasikan untuk mendanai sarana prasarana dan kegiatan desa yang harus berkelanjutan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan juga pemberdayaannya. Seluruh masyarakat terutama di daerah tertinggal akan dapat merasakan manfaat apabila pemerintah desa dapat membagi dana desa sebagai sistem yang berkelanjutan.

(5) Prioritas yang didasarkan pada segi prakarsa inovasi desa. Inovasi dari pemerintah desa yang sepenuhnya memperoleh dukungan masyarakat desa dapat menanggulangi terjadinya bencana alam dan non alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan sehingga penggunaan dana desa terkontrol dengan baik dalam upaya pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

(6) Prioritas yang didasarkan pada segi pengawasan. Masyarakat harus memiliki partisipasi yang besar dalam pengawasan penggunaan dana desa yang dalam pengelolaannya bersifat akuntabel dan transparan. Dana desa yang telah dipakai untuk mendanai kegiatan desa harus secepatnya dipublikasikan di tempat umum atau tempat yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat desa. Pengelolaan dana desa harus diketahui oleh seluruh aparat desa dan masyarakat dikarenakan bersifat sensitif dan merupakan sebuah inti dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

(7) Prioritas yang didasarkan pada segi pengembangan kegiatan selain prioritas penggunaan dana desa. Selain program yang diprioritaskan, prasyarat dalam penggunaan dana desa dapat dipenuhi oleh bupati atau walikota yang memastikan bahwa semua kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan desa yang dibutuhkan dapat disediakan secara keseluruhan oleh desa.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik. Adam mengatakan “*the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services*”. Menurut pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan suatu sarana yang digunakan agar terbebas dari keterbelakangan sehingga kualitas hidup dapat meningkat (Widiyanto et al., 2021).

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah upaya peningkatan potensi dan kemampuan dalam diri masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang secara mandiri dalam bidang agama, sosial, ekonomi dan budaya serta dapat secara maksimal mewujudkan jati diri, harkat, dan juga martabat untuk melangsungkan hidup. (Almasri & Deswimar, n.d.).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya pembangunan dalam diri masyarakat melalui program dan kegiatan yang memiliki

tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki setiap masyarakat sehingga kualitas kehidupan dapat meningkat.

Menurut Sumaryadi pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang pada hakikatnya yaitu untuk mendukung pembangunan manusiawi yang dapat dipercaya dan menyeluruh pada masyarakat miskin, tertinggal, lemah dan kurang beruntung serta memberdayakan masyarakat desa secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan dasar dan juga dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat (Karimah et al., 2014).

2.2.2 Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah desa harus terus melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu dan mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Oleh sebab itu, terdapat tiga upaya dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

(1) *Enabling*, yaitu menciptakan keadaan yang membuat potensi masyarakat desa sangat mungkin untuk berkembang. Artinya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan sehingga setiap masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya mendorong, membangunkan kesadaran, dan memotivasi masyarakat terhadap potensi yang dimilikinya serta ingin mengembangkannya (Widiyawati, 2020).

(2) *Empowering*, yaitu penguatan potensi yang masyarakat desa miliki dengan usaha-usaha secara nyata mengenai tersedianya berbagai macam masukan dan membuka semua peluang yang dapat menjadikan masyarakat semakin maju dan berdaya. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya program khusus dikarenakan program umum tidak selalu dapat dijangkau oleh masyarakat yang kurang berdaya (Widiyawati, 2020).

(3) *Protecting*, yaitu perlindungan dan pembelaan kepentingan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat semaksimal mungkin dilakukan pencegahan masyarakat lemah menjadi bertambah lemah dikarenakan kurangnya daya untuk menghadapi masyarakat kuat. Perlindungan dan pembelaan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak seimbang antara masyarakat kuat dengan masyarakat lemah (Margayaningsih, n.d.).

2.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

2.3.1 Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan masyarakat untuk membenahi tata kehidupan sehingga dapat berubah dalam segala aspek kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya yang memungkinkan masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungan hidupnya (Ariadi, 2019).

Infrastruktur menurut Stone dalam Prasetyo diartikan sebagai sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan atau dikembangkan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dalam penyediaan transportasi, pembuangan limbah, tenaga listrik, air, dan layanan-layanan lainnya untuk digunakan sebagai fasilitas dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi (Lestari & Suhadak, 2019).

Pembangunan pedesaan menurut Adisasmita adalah bagian penting dari pembangunan nasional dimana upaya yang memiliki tujuan agar kualitas sumber daya manusia masyarakat pedesaan dapat meningkat yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan didasarkan pada kemampuan dan potensi desa (Riskayanti, 2021).

Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah suatu upaya perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui program secara terencana dan berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

2.3.2 Prinsip Pembangunan Desa

Prinsip-prinsip pembangunan desa harus mampu diterapkan dalam pengalokasian dana desa, supaya masyarakat desa dapat merasakan dan memanfaatkan program pembangunan yang dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Menurut Adisasmita dalam

pembangunan desa setidaknya terdapat lima prinsip yang harus diterapkan, antara lain:

- (1) **Transparansi.** Transparansi adalah sifat terbuka dalam memberikan informasi tentang pemerintahan berupa informasi keuangan ataupun informasi kebijakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan (Dewi & Adi, 2019).
- (2) **Akuntabilitas.** Menurut Mardiasmo akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas berhasil maupun tidak berhasilnya setiap tahapan kegiatan dan proses pembangunan dengan baik dan benar terhadap pemerintah maupun masyarakat desa (Dewi & Adi, 2019).
- (3) **Partisipatif.** Partisipatif adalah suatu wujud keinginan untuk terlibat dan ikut serta secara aktif masyarakat desa pada proses merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa (Ariadi, 2019).
- (4) **Dapat dirasakan masyarakat.** Dalam melakukan kegiatan pembangunan desa harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa serta mampu menyelesaikan yang menjadi permasalahan di desa. Pembangunan desa dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari program pembangunan yang dilakukan (Rohmah & Ma'ruf, 2016).

(5) Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut Effendy dalam Wibawa adalah proses dan tahapan pembangunan yang dilakukan secara serasi dan sangat memperhatikan potensi saat ini dan seterusnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa agar pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara terus-menerus (Rohmah & Ma'ruf, 2016).

2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti-peneliti terdahulu sudah banyak melakukan penelitian yang membahas tentang alokasi dana desa, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sejenis. Perbedaan tersebut antara lain dari variabel penelitian, tujuan penelitian, perolehan data dan metode yang penelitian digunakan. Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Variabel Intervening Pembangunan Infrastruktur Desa (Survey pada Masyarakat Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro)”, beberapa penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi agar penelitian yang dilakukan semakin relevan.

Dimas Okta Dydha (2017) melakukan penelitian “Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa memperoleh pengaruh signifikan dan positif dari penggunaan dana desa.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dana desa, pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa, variabel dana desa sebagai variabel bebas dan variabel pemberdayaan masyarakat desa sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya variabel intervening, variabel pembangunan infrastruktur desa tidak berperan sebagai variabel intervening melainkan berperan sebagai variabel terikat (Dydha, 2017).

Penelitian yang dilakukan Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, Sriniyati (2019) berjudul “Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat desa memperoleh dampak dari alokasi dana desa. Penelitian ini memiliki persamaan terdapat variabel alokasi dana desa dan juga pembangunan desa, dana desa disini digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan perbedaannya tidak terdapat variabel intervening, variabel pembangunan infrastruktur desa berperan sebagai variabel terikat, tidak menggunakan variabel pemberdayaan masyarakat desa melainkan menggunakan variabel kesejahteraan masyarakat desa (Muslihah et al., 2019).

Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Susetyo, Mira Sumira (2020) dengan judul “Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi”. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa memperoleh dampak signifikan dan positif dari dana desa, pemberdayaan masyarakat desa memperoleh pengaruh signifikan dan positif dari pembangunan desa. Persamaan dengan penelitian ini terdapat variabel dana desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa berperan sebagai variabel bebas dan pemberdayaan masyarakat desa berperan sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu tidak menggunakan variabel intervening, variabel pembangunan desa dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel bebas (Firmansyah et al., 2020).

Nalom Siagian, Darma Manalu, Artha Lumban Tobing (2021) juga melakukan penelitian “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa memiliki pengaruh signifikan dan positif, kesejahteraan masyarakat desa memperoleh pengaruh signifikan dan positif dari pelaksanaan kebijakan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat sebagai variabel intervening. Terdapat persamaan yaitu menggunakan variabel intervening, variabel dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel pemberdayaan masyarakat desa berperan sebagai variabel intervening, tidak menggunakan

variabel pembangunan masyarakat desa, serta menggunakan variabel kesejahteraan masyarakat desa sebagai variabel bebas (Siagian et al., 2021).

Dalam penelitian Suardi (2021) berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun 2019”. Hasil menunjukkan pemberdayaan masyarakat memperoleh pengaruh positif dan signifikan dari alokasi dana desa dengan nilai t tabel tidak lebih besar dari t hitung ($1,662 < 9,940$) dan nilai signifikansi alokasi dana desa tidak lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 ($0,05 > 0,000$). Terdapat persamaan penelitian yaitu menggunakan variabel alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat, variabel alokasi dana desa berperan sebagai variabel bebas dan pemberdayaan masyarakat berperan sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat variabel intervening dan juga tidak menggunakan variabel pembangunan infrastruktur desa, hanya menggunakan variabel alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat (Suardi, 2021).

Selanjutnya Juan Kristoven Mangeto (2018) dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso)”. Penelitian ini menghasilkan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembangunan infrastruktur desa, terdapat pengaruh signifikan dan positif penggunaan dana terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Persamaannya yaitu variabel yang digunakan yaitu variabel dana desa, pembangunan desa dan juga pemberdayaan

masyarakat desa, dana desa dijadikan sebagai variabel bebas dan pemberdayaan masyarakat desa dijadikan sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak menggunakan variabel intervening, variabel pembangunan infrastruktur desa disini dijadikan sebagai variabel bebas bukan sebagai variabel intervening (Mangeto, 2018).

2.5 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pendapat sementara terhadap permasalahan yang belum terbukti kebenarannya dan harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data yang telah terkumpul melalui sebuah penelitian. Menurut Gunawan, hipotesis merupakan suatu dugaan atau anggapan atau asumsi terhadap suatu hal yang dapat diterima atau ditolak bukti kebenarannya secara empiris (Wardani, 2020). Berdasarkan kerangka konseptual dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka hipotesis pada penelitian ini antara lain:

- (1) Pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa

Alokasi dana desa adalah penyaluran separuh dana perimbangan yang dihasilkan kabupaten dan separuh dari pendapatan desa yang dihasilkan dari pembagian hasil pajak daerah untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten kemudian disalurkan untuk mendanai terselenggaranya pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan infrastruktur desa tidak akan terlaksana tanpa adanya alokasi dana desa.

Jordy Putra Prananda melakukan penelitian terkait yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan (Prananda, 2018). Penelitian tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Evi Damayanti yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur (Damayanti, 2022).

Dari penjelasan tersebut hipotesis yang dapat diambil yaitu:

H₁ : Terdapat pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.

(2) Pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa

Alokasi dana desa diprioritaskan salah satunya untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa dikarenakan adanya alokasi dana desa. Dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Ero Raja Kede menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat (Kede, 2019). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Syah Abadi Mendrofa dengan hasil alokasi dana desa

memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat (Mendrofa, 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis yang digunakan yaitu:

H₂ : Terdapat pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Pengaruh pembangunan infrastruktur desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar program dan kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah infrastruktur yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat desa akan semakin maksimal apabila pembangunan infrastruktur desa terus dilakukan.

Oleh karena itu, dapat diambil hipotesis yaitu:

H₃ : Terdapat pengaruh pembangunan infrastruktur desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa

Alokasi dana desa diprioritaskan untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Pemprioritasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat desa. Dalam hal ini dapat

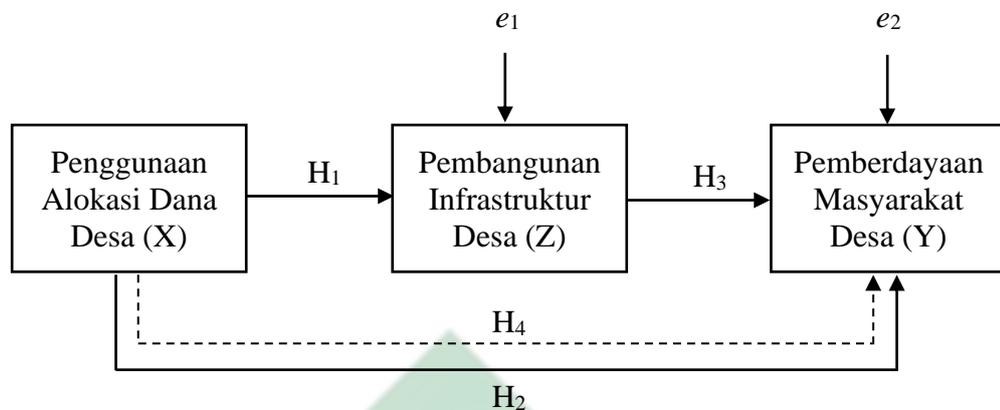
disimpulkan bahwa alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur desa saling berhubungan.

Hipotesis yang digunakan berdasarkan pernyataan tersebut yaitu:

H₄ : Terdapat pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual biasa disebut juga kerangka berfikir adalah sebuah bentuk uraian yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan alur atau tujuan dalam sebuah penelitian. Pada kerangka konseptual ini peneliti akan menguraikan gambaran umum tentang penggunaan alokasi dana desa yang akan memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa di Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Dimana penggunaan alokasi dana desa menjadi variabel independen/bebas, pemberdayaan masyarakat desa menjadi variabel dependen/terikat dan pembangunan infrastruktur desa menjadi variabel intervening. Penggambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Dilihat dari Gambar 2.1, pada penelitian ini kerangka konseptual dapat dijelaskan bahwa pertama, penggunaan alokasi dana desa mempengaruhi pembangunan infrastruktur desa secara langsung. Kedua, penggunaan alokasi dana desa mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa secara langsung. Ketiga, pembangunan infrastruktur desa mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa secara langsung. Keempat, penggunaan alokasi dana desa mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur desa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Pendekatan penelitian kuantitatif yakni pendekatan yang membutuhkan aspek pengukuran, rumus, perhitungan dan kebenaran data numeriknya pada usulan penelitian, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, hasil dan kesimpulan sampai kepenulisannya (Djollong, 2014). Penelitian kuantitatif ini menciptakan beberapa penemuan yang dapat ditemukan dengan menggunakan beberapa langkah-langkah statistik atau model-model dari pengukuran (kuantifikasi) lainnya (Jaya, 2020). Sedangkan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan melalui penyebaran angket yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan untuk masyarakat di Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan dimulai pada bulan Juli 2022.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut KBBI populasi merupakan seluruh jumlah penduduk atau orang di suatu tempat dan memiliki karakteristik yang sama, sejumlah makhluk hidup baik manusia maupun lainnya yang berada pada suatu tempat tertentu yang dijadikan peneliti sebagai sumber pengambilan sampel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Roflin et al., 2021). Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini yakni seluruh masyarakat Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 1.147 jiwa.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah keluarga dari populasi yang lebih kecil jumlahnya dan dipilih menggunakan teknik tertentu yang dapat menjelaskan populasi atau sampel itu sendiri (Sumargo, 2020). Sampel yang ditetapkan adalah masyarakat Dusun Krajan Desa Cancung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 92 orang yang perhitungannya memakai rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1.147}{1 + 1.147 \times 0,1^2}$$

$n = 91,98$ dibulatkan menjadi 92 orang.

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan 10%

Sampel yang dipilih dan diambil pada penelitian ini memakai teknik *probability sampling* dengan *simple random sampling*. *Probability sampling* artinya peluang yang sama diberikan kepada tiap kelompok populasi untuk dijadikan peneliti sebagai anggota sampel (Anshori & Iswati, 2009).

3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono variabel yaitu semua objek yang dijadikan titik perhatian dalam penelitian yang ditentukan oleh peneliti dan selanjutnya dipelajari sehingga didapatkan suatu informasi yang dapat diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini memiliki tiga variabel yakni variabel intervening, variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen atau bebas yaitu variabel yang berpengaruh dan memiliki sifat bebas atau tidak terikat oleh variabel lain, dilambangkan dengan huruf X. Variabel terikat atau dependen yaitu variabel yang sifatnya terikat dan memperoleh pengaruh dari variabel lain, dilambangkan dengan huruf Y. Variabel antara atau intervening yaitu variabel yang memberikan pengaruh hubungan variabel dependen dengan variabel independen membentuk hubungan tidak langsung, dilambangkan dengan huruf Z (Sudaryono, 2016). Pada penelitian ini

menggunakan satu variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel intervening yaitu:

1. Variabel independen (X) : Penggunaan Alokasi Dana Desa
2. Variabel dependen (Y) : Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Variabel intervening (Z) : Pembangunan Infrastruktur Desa

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemaparan arti dari setiap variabel yang ada pada penelitian dengan cara pemberian spesifikasi atau indikator secara operasional untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini memiliki beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional

No.	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Alokasi dana desa adalah penyaluran separuh dana perimbangan yang dihasilkan kabupaten dan separuh dari pendapatan desa yang dihasilkan dari pembagian hasil pajak daerah untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten kemudian disalurkan untuk mendanai terselenggaranya pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan serta kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 	Skala <i>Likert</i>

2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah usaha peningkatan potensi dan kemampuan dalam diri masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang secara mandiri pada bidang agama, sosial, ekonomi dan budaya serta dapat secara maksimal mewujudkan jati diri, harkat, dan juga martabat untuk melangsungkan hidup. Pemberdayaan masyarakat meliputi <i>enabling</i> (pengembangan) potensi, <i>empowering</i> (penguatan) potensi dan <i>protecting</i> (perlindungan) terhadap masyarakat lemah.	1. <i>Enabling</i> (pengembangan) 2. <i>Empowering</i> (penguatan) 3. <i>Protecting</i> (perlindungan)	Skala <i>Likert</i>
3.	Pembangunan Infrastruktur Desa adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan perubahan dan pertumbuhan dengan membuat program secara terencana dan berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.	1. Pemenuhan kebutuhan dasar 2. Peningkatan aksesibilitas	Skala <i>Likert</i>

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas yaitu suatu uji yang berfungsi untuk melihat valid atau tidak valid suatu alat ukur yang dipakai dalam penelitian. Yang dimaksud alat ukur adalah pertanyaan atau pernyataan yang dicantumkan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila variabel yang diukur oleh kuesioner dapat dijawab oleh pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner (Janna, n.d.). Valid atau tidak validnya suatu item alat ukur dapat dilihat melalui apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dinyatakan valid dan sebaliknya.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu indeks yang berfungsi untuk melihat suatu instrumen yang dipakai dalam penelitian seberapa jauh dapat dipercaya, artinya sejauh mana suatu pengukuran memiliki hasil yang selalu stabil apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang dengan memakai alat ukur dan kepada fenomena yang sama. Alat ukur dinyatakan reliabel apabila dilakukan pengukuran berulang-ulang dan hasilnya tetap sama. Apabila jawaban dari kuesioner selalu stabil atau konsisten dari masa ke masa maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel (E, 2011). *Cronbach's Alpha* biasa digunakan dalam pengujian reliabilitas dengan ketentuan jika $\alpha > 0,6$ maka alat ukur dikatakan reliabel dan sebaliknya.

3.7 Data dan Sumber Data

3.7.1 Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini termasuk data primer. Secara sederhana data primer disebut sebagai data mentah. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan data primer adalah data yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumber aslinya dan tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian.

2.7.2 Sumber Data

Sumber data yang diambil pada penelitian ini yakni diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Dusun Krajan Desa

Cancang Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang dijadikan peneliti sebagai sampel penelitian.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner/angket yang kemudian diberikan kepada responden. Menurut Nazir, kuesioner/angket adalah alat pengumpul data dengan pemberian sejumlah pernyataan atau pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner/angket dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan terbuka atau tertutup (Rukajat, 2018). Penelitian ini menggunakan kuesioner/angket dengan pernyataan tertutup yang jawaban dari tiap pernyataan sudah dicantumkan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih satu dari beberapa pilihan jawaban. Angket/kuesioner menggunakan pengukuran skala *Likert* yaitu pengukuran terhadap fenomena yang terjadi melalui pendapat, sikap dan persepsi individu atau kelompok. Skala *Likert* yang digunakan berupa pernyataan positif yang memiliki lima pilihan jawaban dengan pemberian skor 5 – 1 sebagai berikut (Pranatawijaya et al., 2019):

Tabel 3. 2
Pengukuran Skala Likert

No.	Pilihan Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 Uji Asumsi Klasik

3.9.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas pada model regresi mempunyai kenormalan atau tidak pada distribusinya. Suatu data disebut normal jika data tersebut tidak bias, sehingga akan menggambarkan data yang sebenarnya. Terdapat dua cara yang dapat dipakai untuk melihat normal atau tidaknya distribusi suatu residual adalah dengan pengujian statistik dan analisis grafik. Pada uji normalitas ini, disarankan untuk melakukan dua pengujian untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, pada uji statistik, uji normalitas dapat diketahui melalui nilai kurtosis dan skewnes residual dengan Kolmogrov-Smirnov (KS). Uji normalitas memiliki ketentuan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan normal dan sebaliknya (Saputra, 2018).

3.9.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk menunjukkan ada atau tidak adanya antara variabel independen (bebas) yang mempunyai suatu korelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian. Apabila antara variabel bebas (independen) tidak terdapat atau tidak ditemukan korelasi artinya model regresi dinyatakan baik. Nilai Tolerance dan VIF (*Variance*

Inflation Factor) digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas. Apabila nilai VIF tiap-tiap variabel bebas >10 dan Tolerance tiap-tiap variabel bebas $< 0,10$ maka model regresi terdapat multikolinearitas dan sebaliknya (Aini, 2018).

3.9.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk melihat ada atau tidaknya residual suatu penelitian ke penelitian lain yang memiliki suatu varian yang berbeda dalam sebuah model regresi yang diteliti. Model regresi dapat dinyatakan baik jika tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika residual suatu penelitian ke penelitian lain memiliki varian yang sama maka model regresi dinamakan homoskedastisitas, sedangkan model regresi disebut heteroskedastisitas jika residual suatu penelitian ke penelitian lain memiliki varian yang berbeda (Setiawati, 2021).

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat menggunakan uji Glejser dengan ketentuan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya.

3.9.2 Uji Hipotesis Parsial (t)

Uji parsial (t) adalah suatu pengujian yang dipakai untuk melihat signifikan atau tidak signifikannya tiap-tiap koefisien regresi terhadap variabel terikat dengan memandang variabel bebas lainnya tetap (konstan). Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam uji parsial (t) yaitu membuat H_a (hipotesis alternatif) dan H_0 (hipotesis nol)

dengan α (taraf nyata) yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Kesimpulan dari uji ini diambil dengan melihat nilai α (5%) dengan syarat jika nilai signifikannya $< 0,05$ artinya H_0 ditolak, sedangkan jika nilai signifikannya $> 0,05$ artinya H_0 diterima. (Sulton Malik, 2019)

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Dalam artian sebesar apa peran dari pengaruh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikatnya. Besar nilai determinan yaitu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Apabila nilai determinan semakin mendekati 1 diartikan hampir seluruh informasi dapat diberikan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat (Mangeto, 2018).

3.9.4 Uji *Path Analysis* (Analisis Jalur)

Path analysis atau analisis jalur yakni suatu pengujian analisis statistik pengembangan dari analisis regresi. Untuk menunjukkan terdapat atau tidak terdapat pengaruh yang diperoleh variabel dependen (terikat) dari variabel independen (bebas) secara simultan dan juga parsial perlu dilakukan analisis regresi (Yudiatmaja, 2017). Teknik analisis jalur menurut Robert D. Rutherford yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan kausalitas jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara langsung maupun secara tidak langsung pada regresi berganda (Ghodang, 2020).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Desa Cancung adalah suatu desa yang lokasinya berada di Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro. Wilayah Desa Cancung merupakan wilayah dalam kawasan hutan yang dikelilingi banyak pohon jati. Secara Geografis Desa Cancung terletak pada posisi $7^{\circ}19'36''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}48'37''$ Bujur Timur.

Desa Cancung memiliki luas wilayah sebesar $34,95 \text{ km}^2$ atau 3.495 Ha dengan luas wilayah desa sebesar $18,50 \text{ km}^2$ atau 1.850 Ha dan luas wilayah hutan sebesar $16,45 \text{ km}^2$ atau 1.645 Ha . Secara administratif Desa Cancung memiliki batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngunut dan Desa Dander Kecamatan Dander, sebelah timur berbatasan dengan Desa Clebung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pragelan Kecamatan Gondang dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bubulan.

Secara topografi wilayah Desa Cancung 100% merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 132 meter di atas permukaan laut. Wilayah Desa Cancung terdiri dari 3 dusun, 6 RW (Rukun Warga) dan 20 RT (Rukun Tetangga). Berikut tabel jumlah dusun, RW dan RT yang ada di Desa Cancung:

Tabel 4. 1 Jumlah Dusun, RW dan RT Desa Cancung

No.	Nama Dusun	RW	RT
1.	Kowang	2	5
2.	Krajan	2	8
3.	Rejo	2	7
Jumlah		6	20

Sumber: Website Resmi Desa Cancung

4.1.2 Jumlah Penduduk

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Cancung

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
2022	1.743	1.789	3.532

Sumber: Website Resmi Desa Cancung

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 penduduk Desa Cancung berjumlah 3.532 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.743 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.789 jiwa.

4.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini memiliki beberapa karakteristik reponden antara lain yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir dengan responden berjumlah 92 orang yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	41	44,57%
Perempuan	51	55,43%

Total	92	100%
-------	----	------

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 92 responden terdapat laki-laki berjumlah 41 orang atau sebesar 44,57% dan perempuan berjumlah 51 atau sebesar 55,43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki lebih banyak responden yang berjenis kelamin perempuan.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 4 Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Persentase
< 26 tahun	16	17,39%
26 – 35 tahun	24	26,09%
36 – 45 tahun	21	22,83%
> 45 tahun	31	33,69%
Total	92	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang memiliki usia < 26 tahun berjumlah 16 atau sebesar 17,39%, usia 26 – 35 tahun berjumlah 24 atau sebesar 26,09%, usia 36 – 45 tahun berjumlah 21 atau sebesar 22,83% dan usia > 45 tahun berjumlah 31 atau sebesar 33,69%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan usia > 45 tahun memiliki jumlah paling banyak dan responden dengan usia < 26 tahun memiliki jumlah paling sedikit.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 5 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	5	5,43%
Petani	30	32,61%
Pegawai/PNS	1	1,09%
Karyawan Swasta	4	4,35%
Wiraswasta	20	21,74%
Ibu Rumah Tangga	32	34,78%
Total	92	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang menjadi Pelajar/Mahasiswa berjumlah 5 atau sebesar 5,43%, Petani berjumlah 30 atau sebesar 32,61%, Pegawai/PNS berjumlah 1 atau sebesar 1,09%, Karyawan Swasta berjumlah 4 atau sebesar 4,35%, Wiraswasta berjumlah 20 atau sebesar 21,74% dan Ibu Rumah Tangga berjumlah 32 atau sebesar 34,78%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan pekerjaan Ibu Rumah Tangga memiliki jumlah paling banyak dan responden dengan pekerjaan Pegawai/PNS memiliki jumlah paling sedikit.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 6 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SD	30	32,61%
SMP/MTS	28	30,43%
SMA/SMK	27	29,35%
Diploma/Sarjana	7	7,61%
Total	92	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang memiliki pendidikan terakhir SD berjumlah 30 atau sebesar 32,61%, SMP/MTS berjumlah 28 atau sebesar 30,43%, SMA/SMK berjumlah 27 atau sebesar 29,35% dan Diploma/Sarjana berjumlah 7 atau sebesar 7,61%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMP/MTS memiliki jumlah paling banyak dan responden dengan Pendidikan terakhir Diploma/Sarjana memiliki jumlah paling sedikit.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat valid atau tidak validnya suatu kuesioner yang dipakai dalam penelitian. Ketentuan dalam uji validitas yaitu apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dinyatakan valid.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	Penggunaan Alokasi Dana Desa (X)	X.1	0,466	0,207	Valid
		X.2	0,452	0,207	Valid
		X.3	0,382	0,207	Valid
		X.4	0,509	0,207	Valid
		X.5	0,521	0,207	Valid
		X.6	0,756	0,207	Valid
		X.7	0,710	0,207	Valid
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Y.1	0,430	0,207	Valid
		Y.2	0,495	0,207	Valid

	Desa (Y)	Y.3	0,548	0,207	Valid
		Y.4	0,830	0,207	Valid
		Y.5	0,681	0,207	Valid
		Y.6	0,599	0,207	Valid
3.	Pembangunan Infrastruktur Desa (Z)	Z.1	0,545	0,207	Valid
		Z.2	0,713	0,207	Valid
		Z.3	0,376	0,207	Valid
		Z.4	0,681	0,207	Valid
		Z.5	0,667	0,207	Valid
		Z.6	0,582	0,207	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dengan r_{tabel} yang digunakan sebesar 0,207. Artinya dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu indeks yang berfungsi untuk melihat sejauh mana suatu pengukuran memiliki hasil yang selalu stabil apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. *Cronbach's Alpha* biasa digunakan dalam pengujian reliabilitas dengan ketentuan jika $\alpha > 0,6$ maka alat ukur dikatakan reliabel.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Penggunaan Alokasi Dana Desa (X)	0,615	Reliabel
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa (Y)	0,647	Reliabel
3.	Pembangunan Infrastruktur Desa (Z)	0,613	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan dapat dilihat dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan reliabel dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0,6.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk melihat variabel terikat dan variabel bebas pada model regresi mempunyai kenormalan atau tidak pada distribusinya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Uji normalitas memiliki ketentuan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan normal.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.13270273
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.636
Asymp. Sig. (2-tailed)		.814

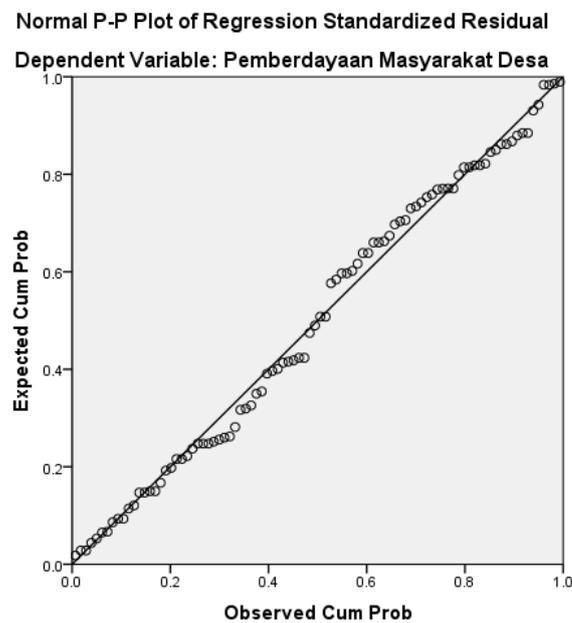
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov

sebesar 0,636 lebih besar dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kenormalan pada distribusinya. Selain itu, uji probability plot juga dapat digunakan untuk melihat normal atau tidaknya data dalam penelitian.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Probability Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji probability plot dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Artinya dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kenormalan pada distribusinya.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk menunjukkan ada atau tidak adanya antara variabel independen (bebas) yang mempunyai suatu korelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian. Nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas dengan ketentuan $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$ maka tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	.634	.528		
1 Penggunaan Alokasi Dana Desa	2.004	.048	.798	1.253
Pembangunan Infrastruktur Desa	5.411	.000	.798	1.253

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,10. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian yang dilakukan.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk melihat ada atau tidaknya residual suatu penelitian ke penelitian lain yang memiliki suatu varian yang berbeda dalam sebuah model

regresi yang diteliti. Heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan uji Glejser dengan ketentuan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

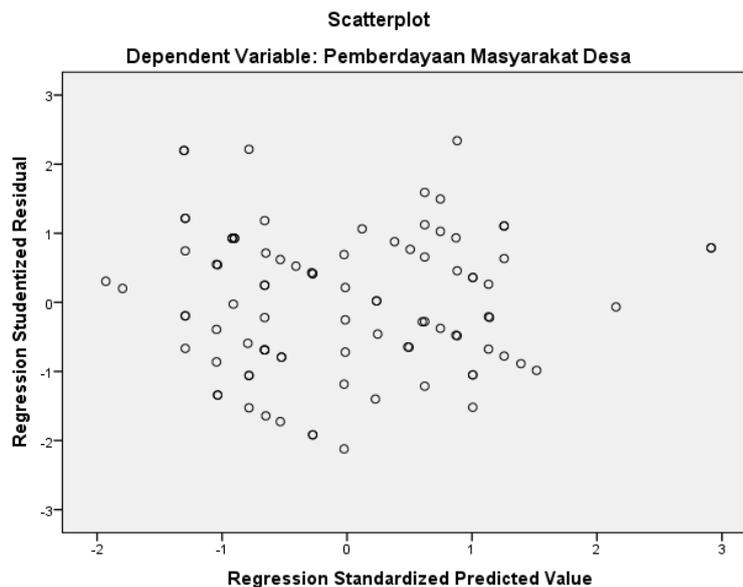
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	2.827	1.674		
Penggunaan Alokasi Dana Desa	.027	.057	.056	.473	.638
Pembangunan Infrastruktur Desa	-.073	.064	-.134	-1.141	.257

a. Dependent Variable: Abs_Res2

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, dengan grafik scatterplot juga dapat digunakan untuk melihat terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tersebar di sekitar atau di atas maupun di bawah angka 0.

Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian yang dilakukan.

4.3.3 Hasil Regresi *Path Analysis*

Dalam penelitian ini perlu dilakukan dua kali uji regresi dikarenakan terdapat dua persamaan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Persamaan 1
Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		5.751	.000
Penggunaan Alokasi Dana Desa	.449	4.769	.000
R = .449 ^a R Square (R ²) = .202 Adjusted R Square = .193 e = 1.924			Dependent Variable (Pembangunan Infrastruktur Desa)

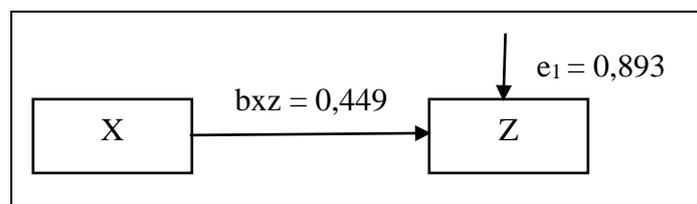
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji regresi persamaan 1 dapat dilihat bahwa nilai koefisien penggunaan alokasi dana desa sebesar 0,449 dan dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap variabel pembangunan infrastruktur desa. Artinya apabila setiap nilai penggunaan alokasi dana desa bertambah 1% maka nilai pembangunan infrastruktur desa akan bertambah sebesar 0,449. Sehingga diagram jalur persamaan 1 diperoleh sebagai berikut:

Persamaan 1: $Z = bxz + e_1$

$$Z = 0,449 + 0,893$$

e_1 diperoleh dari $\sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,202} = 0,893$



Gambar 4. 3 Diagram Jalur Persamaan 1

Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Persamaan 2
Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		.634	.528
Penggunaan Alokasi Dana Desa	.188	2.004	.048
Pembangunan Infrastruktur Desa	.507	5.411	.000
R = .614 ^a R Square (R ²) = .377 Adjusted R Square = .363 e = 2.157			Dependent Variable (Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

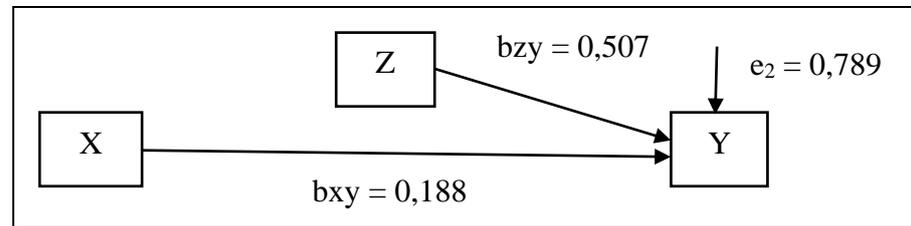
Berdasarkan hasil uji regresi persamaan 2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien penggunaan alokasi dana desa sebesar 0,188 dan dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap variabel pemberdayaan masyarakat desa. Artinya apabila setiap nilai penggunaan alokasi dana desa bertambah 1% maka nilai pemberdayaan masyarakat desa akan bertambah sebesar 0,188.

Nilai koefisien pembangunan infrastruktur desa sebesar 0,507 dan dapat disimpulkan bahwa variabel pembangunan infrastruktur desa memiliki pengaruh positif terhadap variabel pemberdayaan masyarakat desa. Artinya apabila setiap nilai pembangunan infrastruktur desa bertambah 1% maka nilai pemberdayaan masyarakat desa akan bertambah sebesar 0,507. Sehingga diagram jalur persamaan 2 diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: } Y = bxy + bzy + e_2$$

$$Y = 0,188 + 0,507 + 0,789$$

e_2 diperoleh dari $\sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,377} = 0,789$



Gambar 4. 4 Diagram Jalur Persamaan 2

4.3.4 Uji Parsial (t)

Uji parsial (t) adalah suatu pengujian yang dipakai untuk melihat signifikan atau tidak signifikannya tiap-tiap koefisien regresi terhadap variabel terikat dengan memandang variabel bebas lainnya tetap (konstan). Kesimpulan diambil dengan syarat jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka dikatakan berpengaruh signifikan.

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel penggunaan alokasi dana desa sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap variabel pembangunan infrastruktur desa.

Selanjutnya pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel penggunaan alokasi dana desa sebesar 0,048 dan variabel pembangunan infrastruktur desa sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa dan variabel pembangunan infrastruktur desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

4.3.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Apabila nilai determinan semakin mendekati 1 diartikan hampir seluruh informasi dapat diberikan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat.

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,202. Artinya dapat disimpulkan bahwa sebesar 20,2% terdapat pengaruh variabel penggunaan alokasi dana desa terhadap variabel pembangunan infrastruktur desa, sementara sisanya 78,2% terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0,377. Artinya dapat disimpulkan bahwa sebesar 37,7% terdapat pengaruh variabel penggunaan alokasi dana desa dan variabel pembangunan infrastruktur desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa, sementara sisanya 62,3% terdapat pengaruh dari variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.3.6 Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Uji analisis jalur yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan kausalitas jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara langsung maupun secara tidak langsung pada regresi berganda.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh		Total
		Langsung	Tidak Langsung	
X terhadap Z	0,499	0,499		0,499
X terhadap Y	0,188	0,188	$0,499 \times 0,507 = 0,253$	0,441
Z terhadap Y	0,507	0,507		0,507
e ₁	0,893	0,893		0,893
e ₂	0,789	0,789		0,789

Berdasarkan hasil uji analisis jalur dapat dilihat bahwa pengaruh langsung variabel penggunaan alokasi dana desa (X) terhadap variabel pemberdayaan masyarakat desa (Y) sebesar 0,188. Sedangkan pengaruh tidak langsung melalui variabel pembangunan infrastruktur desa (Z) sebagai variabel intervening sebesar 0,253 sehingga pengaruh total sebesar 0,441. Dikarenakan pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung artinya dapat disimpulkan bahwa variabel pembangunan infrastruktur desa sebagai variabel intervening berpengaruh pada hubungan variabel penggunaan alokasi dana desa terhadap variabel pemberdayaan masyarakat desa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis jalur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima, artinya penggunaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur desa dipengaruhi oleh penggunaan alokasi dana desa, dimana besar pengaruh langsung yang diberikan penggunaan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa yaitu sebesar 0,499. Besarnya pengaruh tersebut ditentukan oleh realita situasi yang ada saat ini, dimana dana desa telah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa terkait perbaikan jalan di beberapa lokasi di Desa Cancung, pembangunan penerangan jalan umum desa, pembangunan sanitasi baru, pembangunan pos kesehatan, dan pengelolaan posyandu untuk balita di Desa Cancung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jordy Putra Prananda yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan. Penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Evi Damayanti yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, dana desa memberikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pembangunan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat desa menjadi berkurang secara signifikan dengan adanya dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa memperoleh dampak yang positif dari penggunaan alokasi dana desa. Dalam

program pembangunan infrastruktur desa, penggunaan alokasi dana desa merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar sehingga adanya alokasi dana desa digunakan untuk mendanai seluruh program-program dalam bidang pembangunan infrastruktur desa. Dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat, penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Siagian dalam Rohman dan Ma'aruf yang menyatakan bahwa pembangunan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara sengaja (Siagian et al., 2021). Dana desa untuk pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur. Terlihat bahwa semakin besar dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini menunjukkan keadaan lebih baik yang diinginkan masyarakat desa serta diharapkan pembangunan yang dilakukan akan menjadi berkelanjutan.

Namun penelitian di lapangan mengungkapkan bahwa sebagian besar dana desa masih digunakan untuk pembangunan jalan dan pemenuhan kebutuhan dasar saja, meskipun sebenarnya desa memiliki sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan menjadi usaha yang menguntungkan untuk menopang perekonomian desa, seperti pembangunan koperasi dengan menjual berbagai produk dari hasil UMKM masyarakat desa setempat. Kemudian juga bisa dengan memanfaatkan lahan kosong yang tidak terpakai untuk dijadikan objek wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Hal ini disayangkan karena terdapat lebih banyak pilihan dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur jika dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa karena sangat menguntungkan bagi masyarakat pedesaan dari segi kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur desa memperoleh dampak dan dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, manfaat pembangunan infrastruktur akan meningkat apabila dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur desa juga semakin meningkat.

4.4.2 Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis jalur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima, artinya penggunaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dipengaruhi oleh penggunaan alokasi dana desa, dimana besar pengaruh langsung yang diberikan penggunaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebesar 0,188. Besarnya pengaruh ini disebabkan oleh fakta bahwa dana desa memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana pemberdayaan masyarakat dilaksanakan. Dana desa dipandang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pedesaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengaruh tersebut merupakan wujud dari sejumlah indikator yaitu pengembangan, peningkatan potensi, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Ero Raja Kede yang menunjukkan hasil bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Syah Abadi Mendrofa dengan hasil penelitian yaitu alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan dana desa digunakan pada pengembangan potensi masyarakat desa melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi dan pengembangan sektor UMKM, yang bertujuan meningkatkan potensi masyarakat desa agar masyarakat desa dapat tumbuh dan mandiri. Terkait dengan hal tersebut, penggunaan alokasi dana desa yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat desa dengan berbagai program yang dijalankan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk meningkatkan potensi masyarakat pedesaan. Di Desa Cancung, peningkatan potensi masyarakat desa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan usaha bagi masyarakat desa yang mendukung kemampuan masyarakat dalam rangka menggali potensi masyarakat desa. Kemandirian desa dipengaruhi oleh alokasi dana desa yang digunakan untuk peningkatan potensi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan desa mandiri.

Penggunaan dana desa juga dialokasikan untuk perlindungan masyarakat seperti pembentukan kelompok usaha terutama pada kelompok masyarakat lemah. Tujuan dari program perlindungan ini adalah untuk menjaga agar masyarakat desa tidak saling bersaing. Kelompok usaha tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan dan mencegah persaingan antar masyarakat. Hal ini berdampak positif

karena pemerintah desa tidak hanya memberikan dukungan kepada masyarakat desa dengan mengembangkan dan meningkatkan potensi saja melainkan juga memberikankan perlindungan dan kontrol atas upaya yang telah dilakukan masyarakat desa.

Pengaruh penggunaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, disimpulkan bahwa masyarakat desa memiliki harapan dan dukungan yang tinggi terhadap penggunaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa diprioritaskan salah satunya untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Terselenggaranya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa dikarenakan adanya penggunaan alokasi dana desa. Dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Program pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat berkelanjutan dengan adanya penggunaan alokasi dana desa. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat desa dapat membantu masyarakat untuk hidup mampu dan mandiri sehingga tidak selalu bergantung yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fahrudin yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui tiga tindakan:

enabling yaitu membuat keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, *empowering* yaitu memperkuat kemampuan atau kapasitas melalui peningkatan potensi masyarakat, dan *protecting* yaitu melindungi kepentingan dengan membangun sistem perlindungan bagi masyarakat yang merupakan sasaran dari adanya pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa memiliki pengaruh langsung dengan pemberdayaan masyarakat desa, artinya jika jumlah anggaran dana desa yang digunakan semakin besar maka manfaat bagi masyarakat desa dalam hal pemberdayaan juga semakin besar.

Berdasarkan temuan di lapangan, program pemberdayaan masyarakat di Desa Cancung masih kurang atau hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu di sekitar kantor kepala desa sehingga dikatakan masih belum merata. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa di pinggiran atau di daerah perbatasan kurang mengetahui berbagai program pemberdayaan masyarakat desa, sehingga mengakibatkan munculnya sikap acuh tak acuh terhadap program-program desa yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat, oleh karena itu program pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlalu berdampak pada masyarakat desa yang ada di desa perbatasan desa tersebut. Hal ini disayangkan dikarenakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mendongkrak potensi dan pendapatan masyarakat pedesaan tentunya membutuhkan alokasi dana desa yang cukup besar. Agar program pemberdayaan masyarakat desa

terselenggara secara merata dan menyeluruh serta dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Cancung, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang manfaat yang diperoleh dan juga pentingnya untuk selalu mengikuti program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Adanya strategi tersebut akan dapat mendukung dan meningkatkan potensi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

4.4.3 Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis jalur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima, artinya pembangunan infrastruktur desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur desa, dimana besar pengaruh langsung yang diberikan pembangunan infrastruktur desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebesar 0,507. Besarnya pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya fakta bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki pengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar program dan kegiatan yang dilakukan berjalan

dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah infrastruktur yang ada di desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mastuti et al., 2021) yang menunjukkan hasil bahwa pembangunan infrastruktur desa yaitu infrastruktur jalan berpengaruh dan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat yang merupakan salah satu indikator dari adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Program pembangunan infrastruktur desa merupakan program pemerintah desa yang berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu melalui partisipasi dalam pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di desanya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program pembangunan infrastruktur desa merupakan program bantuan langsung kepada masyarakat, membantu masyarakat dalam memfasilitasi dan mengorganisasi dalam mengidentifikasi masalah kemiskinan, membuat rencana, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan fungsi perangkat desa dalam menjalankan program. Pembangunan infrastruktur desa sebagai program yang mendukung terselenggaranya pemberdayaan

masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat desa yang sebaik-baiknya dalam semua tahapan proses kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, membuat rencana program, memilih kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat tiga unsur pembangunan infrastruktur desa yang menjadi landasan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan infrastruktur desa, penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat pedesaan, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat pedesaan (Sururi, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian pembangunan infrastruktur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan temuan di lapangan bahwa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa seperti sosialisasi atau pelatihan usaha dibutuhkan sebuah ruang atau tempat yang digunakan untuk pelaksanaan program tersebut. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat desa yang berkaitan dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya juga membutuhkan pembangunan terhadap infrastruktur yang digunakan. Adanya pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadikan masyarakat desa semakin berdaya sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama kelompok masyarakat yang lemah.

Namun penelitian di lapangan didapatkan bahwa pembangunan infrastruktur desa hanya dilakukan pada pembangunan jalan dan pemenuhan kebutuhan dasar saja, sehingga kurang mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini disayangkan karena terdapat lebih banyak aspek dalam pemberdayaan masyarakat desa yang membutuhkan pembangunan terhadap infrastruktur yang akan digunakan agar program pemberdayaan semakin efektif dan efisien. Contohnya seperti pembangunan koperasi untuk mendukung UMKM masyarakat desa, pengembangan pada jaringan internet dan telekomunikasi untuk mempermudah dan memperlancar masyarakat dalam mencari informasi mengenai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat desa akan berhasil dan semakin maksimal apabila pembangunan infrastruktur desa terus dilakukan.

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa karena sangat menguntungkan bagi masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa memperoleh dampak dan dipengaruhi secara signifikan oleh pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, manfaat pemberdayaan masyarakat akan meningkat

apabila pembangunan terhadap infrastruktur desa juga semakin meningkat.

4.4.4 Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis jalur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima, artinya penggunaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur desa sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa memiliki pengaruh tidak langsung yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung dimana pengaruh tidak langsung sebesar 0,253 sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,188. Hal tersebut dikarenakan adanya variabel intervening yaitu variabel pembangunan infrastruktur desa yang menyebabkan pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui variabel intervening pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan bahwa alokasi dana desa digunakan untuk membiayai program-program dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur desa juga berperan penting

dalam memfasilitasi masyarakat desa agar program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana.

Namun, penelitian di lapangan didapatkan bahwa sejauh ini pembangunan infrastruktur desa hanya terfokus pada pembangunan jalan dan kebutuhan dasar saja. Hal tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Apabila pembangunan infrastruktur kurang maksimal, maka manfaat dari alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi kurang maksimal dikarenakan kurangnya infrastruktur sebagai penunjang dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian perlu dilakukannya pembangunan infrastruktur desa secara merata dan menyeluruh serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa agar manfaat yang diperoleh dari alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa semakin besar dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di

Desa Cancung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan alokasi dana desa berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan infrastruktur desa.
2. Penggunaan alokasi dana desa dan pembangunan infrastruktur desa berpengaruh secara langsung terhadap pemberdayaan masyarakat desa.
3. Penggunaan alokasi dana desa berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat desa melalui variabel intervening pembangunan infrastruktur desa.

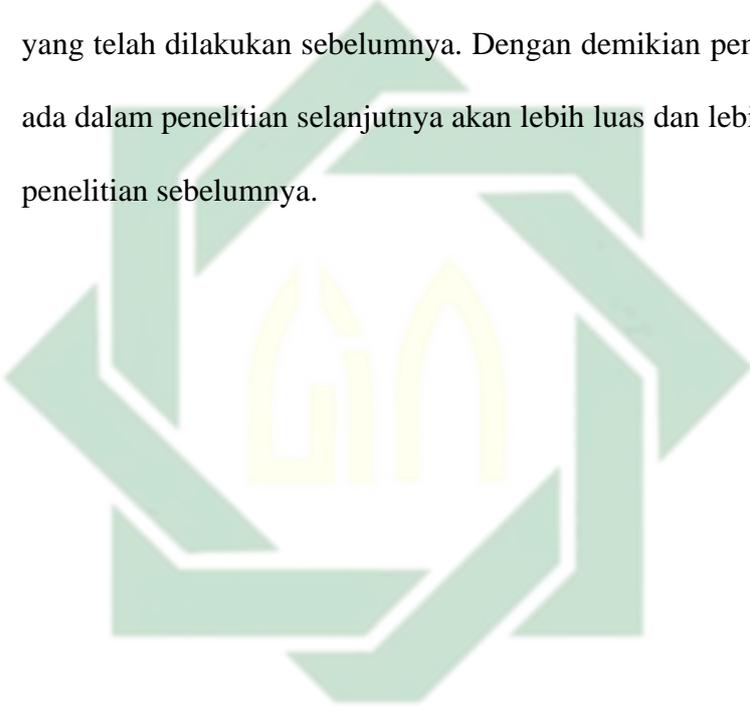
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

- 5.2.1 Pemerintah Desa Cancung diharapkan lebih dapat mengalokasikan dana desa pada program pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara merata dan menyeluruh agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Desa Cancung

yang kurang mengetahui atau kurang peduli dengan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

- 5.2.2 Pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama disarankan dapat menambah sampel atau variabel penelitian serta menambah sumber atau rujukan yang digunakan agar dapat menyempurkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian pembahasan yang ada dalam penelitian selanjutnya akan lebih luas dan lebih lengkap dari penelitian sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

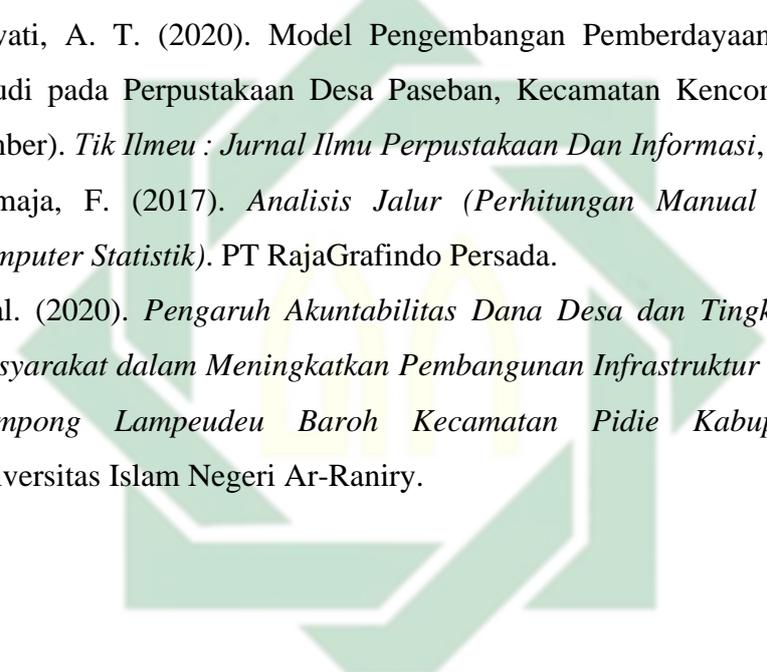
- Aini, A. I. (2018). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Almasri, & Deswimar, D. (n.d.). *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan*. 45.
- Aminah, & Sari, N. (n.d.). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*. 5.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 136–137.
- Balilatfo - KDPDPT. (2018). *Inovasi Desa Membangun: Pemanfaatan Data IDM*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Balilatfo - KDPDPT. (2019). *Jejak Indeks Membangun 2015-2019*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Damayanti, E. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng*. Universitas Muhammadiyah.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 03(02), 289.
- Djollong, A. F. (2014). Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique of Quantitative Research). *ISTIQRA'*, 2(1), 86–87.
- Dydha, D. O. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)* [Universitas

- Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/163040/>
- E, R. W. (2011). Uji Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Epidemiologi Kedokteran Gigi. *Stomatognatic (J.K.G. Unej)*, 8(1), 31.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 42.
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). *Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi*. 3(2), 169.
- Ghodang, H. (2020). *Path Analysis (Analisis Jalur)*. PT. Penerbit Mitra Grup.
- Herianto, B. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sorolangun*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Janna, N. M. (n.d.). *Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Menggunakan SPSS*. 2.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. ANAK HEBAT INDONESIA.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 598.
- Kede, E. E. R. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 337.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Lestari, M., & Suhadak. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 70(1), 100.
- Mangeto, J. K. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan*

- Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Taripta Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso)*. Universitas Brawijaya.
- Margayaningsih, D. I. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. 174.
- Mastuti, R., Chalik, A., Kurniawan, T. S., & Natasha. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 112–120. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.555>
- Mendrofa, S. A. (2021). Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Hiliwa'ele II Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. *Jurnal EMBA*, 9(4), 1045.
- Muslihah, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 86. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>
- Prananda, J. P. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttman. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Riskayanti. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah.
- Ro'is Alfauzi. (2020). Pertanggungjawaban Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal di tengah Pandemi Covid 19. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2), 206–208. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1522>
- Roflin, E., Liberty, I. A., & Pariyana. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. PT. Nasya Expanding Management.

- Rohmah, K. T., & Ma'ruf, M. F. (2016). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 4.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish.
- Saputra, R. A. (2018). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)*. Universitas Bengkulu.
- Septiansyah, B., & Setiawan, A. (2021). Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 24.
- Setiawati. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi di BEI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1585.
- Siagian, N., Manalu, D., & Tobing, A. L. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba. *Buletin Studi Ekonomi*, 26(2), 152. <https://doi.org/10.24843/bse.2021.v26.i02.p01>
- Suardi. (2021). *Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Tahun 2019*. Universitas Muhammadiyah.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Kencana.
- Sulton Malik, A. G. (2019). *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. UNJ Press.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

- Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 2–3.
- Wardani, D. K. (2020). *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif dan Asosiatif)*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3621>
- Widiyawati, A. T. (2020). Model Pengembangan Pemberdayaan Pengetahuan (Studi pada Perpustakaan Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember). *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 88.
- Yudiaatmaja, F. (2017). *Analisis Jalur (Perhitungan Manual dan Aplikasi Komputer Statistik)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zulfadzal. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A